

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH
DAERAH, *LEVERAGE*, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NAOMI RELIANA SIMBOLON

12170193

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naomi Reliana Simbolon
NIM : 12170193
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE*, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2019)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2021

Yang menyatakan



(Naomi Reliana Simbolon)

NIM.12170193

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Naomi Reliana Simbolon

12170193

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
LEVERAGE, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2019)”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

NAOMI RELIANA SIMBOLON

12170193

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 24 Juni 2021

Nama Dosen

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.
(Ketua Tim Penguji)
2. Dra. Agustini Dyah Respati, MBA.
(Dosen Penguji)
3. Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt., CA.
(Dosen Pembimbing)

Tanda Tangan



Yogyakarta, 01 Juli 2021

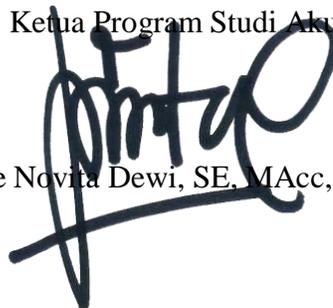
Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Ketua Program Studi Akuntansi



Christine Novita Dewi, SE., MAcc, Ak, CA. CMA., CPA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019)**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 10 Juni 2021



Naomi Reliana Simbolon

12170193

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kasih dan penyertaan-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019)**. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 Program Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman serta pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan masukan dari semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan membalas segala kebaikan semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Naomi Reliana Simbolon

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Komponen dan Tautan.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kontribusi Penelitian.....	10
1.6 Batasan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	12
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah	16

2.1.4	Ukuran Pemerintah Daerah.....	19
2.1.5	Leverage.....	19
2.1.6	Dana Perimbangan.....	21
2.2	Penelitian Terdahulu.....	22
2.3	Pengembangan Hipotesis.....	26
2.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.3.2	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.3.3	Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.3.4	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Data dan Sumber.....	30
3.1.1	Jenis data.....	30
3.1.2	Sumber Data.....	30
3.1.3	Langkah-Langkah Pengumpulan Data.....	30
3.1.4	Metode Penyampelan (Sampling Procedure).....	31
3.2	Definisi Variabel dan Pengukurannya.....	31
3.2.1	Pendapatan Asli Daerah	32
3.2.2	Ukuran Pemerintah Daerah.....	32
3.2.3	Leverage.....	33
3.2.4	Dana Perimbangan.....	33
3.2.5	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	33
3.3	Desain Penelitian.....	34

3.4	Model Statistis dan Uji Hipotesis.....	35
3.4.1	Model Statistis.....	35
3.4.2	Uji Hipotesis.....	36
3.5	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.5.1	Uji Normalitas.....	38
3.5.2	Uji Multikolinieritas.....	38
3.5.3	Uji Autokorelasi.....	39
3.5.4	Uji Heteroskedastisitas.....	39
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Sampel Penelitian.....	41
4.2	Statistik Deskriptif.....	42
4.3	Uji hipotesis.....	45
4.3.1	Hasil Uji Statistik F (Uji F).....	45
4.3.2	Hasil Uji t statistik.....	46
4.3.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	48
4.4	Pembahasan.....	48
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	48
4.4.2	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	49
4.4.3	Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
4.4.4	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	51
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	52
4.5.1	Hasil Uji Normalitas.....	52

4.5.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
4.5.3	Hasil Uji Autokorelasi.....	55
4.5.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA.....		57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Keterbatasan.....	58
5.3	Saran Penelitian Selanjutnya.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....		60
LAMPIRAN.....		63

©UKYDN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE*, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019)

Naomi Reliana Simbolon

12170193

Email: naomireliana29@gmail.com

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Duta Wacana**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage* dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 23 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015-2019. Data LKPD tersebut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik sampling jenuh dan diperoleh sampel sebanyak 110 data selama 5 tahun periode pengamatan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS V.20 *for windows*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan variabel dana perimbangan berpengaruh negatif sementara untuk variabel ukuran pemerintah daerah dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dana perimbangan.

THE INFLUENCE OF THE LOCAL REVENUE, THE SIZE OF LOCAL GOVERNMENT, LEVERAGE, AND BALANCE FUNDS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT

(Empirical study on Local government District/City in the Province of Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019)

Naomi Reliana Simbolon

12170193

Email: naomireliana29@gmail.com

Department Accounting, Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to test and determine the significance of the influence of the local revenue, the size of local government, leverage and fund balance on the financial performance of local government. The population used in this study is the regional government in the Province of East Nusa Tenggara consists of 23 districts/cities. The Data used in this research is secondary data sourced from the Local Government Finance Report (LKPD) fiscal Year 2015-2019. Data LKPD were obtained from the supreme audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia in Nusa Tenggara Timur Province. Sampling in this research is by using saturated sampling technique and obtained a sample of 110 data during the 5-year observation period. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression analysis by using SPSS V.20 for windows. Based on the results of research that has been done can be stated that the variable revenue positive effect and the variable fund balance negative effect while for the variable size of the local government and the leverage does not influence the financial performance of local government.

Keywords: financial performance of local government, the local revenue, the size of local government, the leverage, the fund balance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 menyebabkan salah satu aspek pada akuntansi sektor publik yakni bidang akuntansi keuangan pemerintahan daerah menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Penyelenggaraan keuangan negara dan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang menjadi alasan dilakukannya reformasi pada saat itu. Undang-Undang tersebut memuat tentang pentingnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Oleh sebab itu, undang-undang tersebut juga dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah dikeluarkannya, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada setiap pemerintah daerah untuk dapat mengelola serta memenuhi kepentingan masyarakat daerahnya menurut kehendaknya berlandaskan suara masyarakat dan selaras dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Kusufi, 2012).

Seiring berjalannya waktu, kedua Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut dilakukan sebagai wujud untuk mengubah serta menyempurnakannya. Sejak dimulainya pemberlakuan Undang-Undang tersebut membuat tiap-tiap pemerintah daerah memperoleh kesempatan yang luas untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan bagi daerahnya sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai masing-masing pemerintah daerah (Halim

& Kusufi, 2012). Dengan diberlakukannya perimbangan kewajiban fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut membuat tiap-tiap daerah perlu mempunyai pendapatan atau penghasilan yang cukup serta memiliki sumber dana pembiayaan yang juga memadai untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan pemerintah daerah.

Di masa-masa saat ini, setiap daerah telah memiliki otoritas yang besar dalam mengelola dan menjalankan rumah tangga daerahnya dengan mandiri. Otoritas yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola serta mengatur rakyat daerahnya menurut kehendaknya sendiri dengan berdasar pada suara rakyat namun tetap harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diartikan sebagai otonomi daerah (Halim & Kusufi, 2012). Daerah otonom dalam hal ini yaitu wilayah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berotoritas mengatur dan mengelola segala keperluan dalam pemerintahannya termasuk kepentingan masyarakat sesuai kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah ini guna memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk memantau serta mengamati dana yang digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan juga untuk mendorong tiap pemerintah daerah untuk berinovasi sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat antar daerah. Dengan diberikannya kewenangan otonomi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut agar dapat lebih

memaksimalkan fasilitas layanan dan kesejahteraan yang seimbang dan menyeluruh bagi masyarakatnya.

Penilaian kinerja keuangan pada suatu pemerintah daerah menjadi hal utama yang perlu dilaksanakan semenjak adanya penerapan kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang dilakukan agar setiap pemerintah daerah dapat mengelola sendiri keuangan daerahnya dan dapat memperlancar pembangunan yang ada pada daerah tanpa harus menunggu subsidi dana dari pemerintah pusat (Antari & Sedana, 2018). Kinerja adalah suatu hasil capaian dari apa yang telah dikerjakan, jika kinerja yang ingin dicapai telah sesuai dengan apa yang diinginkan maka hal tersebut berarti kinerja yang diharapkan sudah dilaksanakan dengan bijak. Kinerja keuangan yaitu suatu ukuran kinerja yang dapat kita ukur dengan memakai indikator keuangan. Pengukuran kinerja keuangan termasuk penting untuk dilakukan terutama dalam suatu organisasi, pengukuran tersebut dilakukan agar dapat mengevaluasi kinerja dimasa sebelumnya agar dapat menjadi acuan bagi kinerja selanjutnya (Andriyani, Mukhzarudfa, & PA, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi tingkat capaian yang telah diperoleh dari capaian kerja di bidang keuangan daerah dalam satu periode tertentu (Putri & Darmayanti, 2019). Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan rancangan kerja yang telah dibuat dengan realisasi pelaksanaannya guna kepentingan publik dan sebagai bahan evaluasi serta memperbaiki kinerja. (Antari & Sedana, 2018). Dengan adanya pengukuran kinerja

keuangan maka pemerintah daerah dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kedepannya.

Dalam mengukur kinerja pada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memakai analisis rasio keuangan terhadap APBD. Kinerja keuangan dalam penelitian ini akan diukur dengan memakai rasio efisiensi. Konsep dari efisiensi itu sendiri adalah membandingkan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Output yaitu realisasi biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan pendapatan daerah sementara input yaitu pendapatan daerah yang terealisasi. Pengukuran tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja (Mahsun, 2013). Dengan mengukur rasio efisiensi maka dapat diketahui apakah biaya yang telah pemerintah daerah keluarkan dalam memperoleh pendapatan daerahnya sudah efisien ataukah belum efisien.

Hasil pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tentunya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya yaitu pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dasar pemungutannya didasarkan pada Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang terdapat pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah diantaranya dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain pendapatan asli daerah yang sah.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja keuangan yaitu ukuran pemerintah daerah. Noviyanti & Kiswanto (2016) mengatakan bahwa besar ataupun kecilnya ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari besarnya aset pada pemerintah daerah tersebut. Sari (2016) dalam penelitiannya juga menggunakan total aset dalam menentukan besarnya ukuran pemerintah daerah. Total aset dijadikan tolak ukur karena jika dilihat dari segi nilai maka total aset lebih stabil dibandingkan dengan total pendapatan dan total pegawai pada suatu daerah. Total aset yang semakin besar pada suatu daerah menunjukkan semakin besar juga ukuran pemerintah daerah tersebut. Secara tidak langsung, apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan asetnya dengan baik maka dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memanfaatkan serta mengelola semua sumber potensi-potensi daerahnya dengan sangat baik (Mulyani & Wibowo, 2017). Semakin besar ukuran pemerintah pada suatu daerah maka akan lebih memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas operasioalnya guna melancarkan pelayanan kepada masyarakat (Kusumawardani, 2012).

Leverage merupakan rasio yang yang biasa digunakan dalam akuntansi sektor publik yang dihitung untuk mengukur dan mengetahui besarnya suatu daerah bergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerah. Apabila suatu daerah memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka dapat diartikan bahwa daerah tersebut sangat bergantung pada pinjaman dari luar (Sari I. P., 2016). Rasio yang dipakai dalam mengukur *leverage* yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang yang ada pada daerah dengan total aset daerah untuk

mengetahui seberapa besar aset daerah tersebut terbebani oleh utang. Semakin tinggi *leverage* pada suatu daerah maka hal tersebut berarti semakin kurang bagus kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut karena belum mampu membiayai kegiatan operasional daerahnya secara mandiri sehingga memerlukan dana pinjaman dari pihak luar atau eksternal (Sari I. P., 2016). Oleh karena itu *leverage* juga termasuk menjadi faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.

Faktor yang juga bisa mempengaruhi kinerja keuangan yaitu dana perimbangan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada tiap-tiap daerah untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Besarnya jumlah dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dapat memperlihatkan kesanggupan keuangan daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Peningkatan jumlah dana perimbangan yang pemerintah daerah terima menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah tersebut dalam memaksimalkan potensi keuangan yang ada pada daerahnya sendiri masih sangat kurang sehingga dapat mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga kurang bagus (Putri & Darmayanti, 2019).

Penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat mengetahui apakah pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan merupakan faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan untuk evaluasi bagi pemerintah daerah serta provinsi dalam hal memperbaiki serta meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019).”

1.2 Komponen dan Tautan

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang terdapat pada daerah tersebut. Besaran jumlah PAD yang diperoleh daerah dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan meningkatnya jumlah PAD maka akan memperlihatkan jika pemerintah daerah tersebut telah mampu mengelola sumber daya serta potensi keuangan yang ada pada daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

b. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Sari (2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran pemerintah yang cukup besar mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi dalam mengungkapkan kinerja keuangannya dibanding pemerintah daerah dengan ukuran pemerintah yang kecil. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar juga dituntut agar

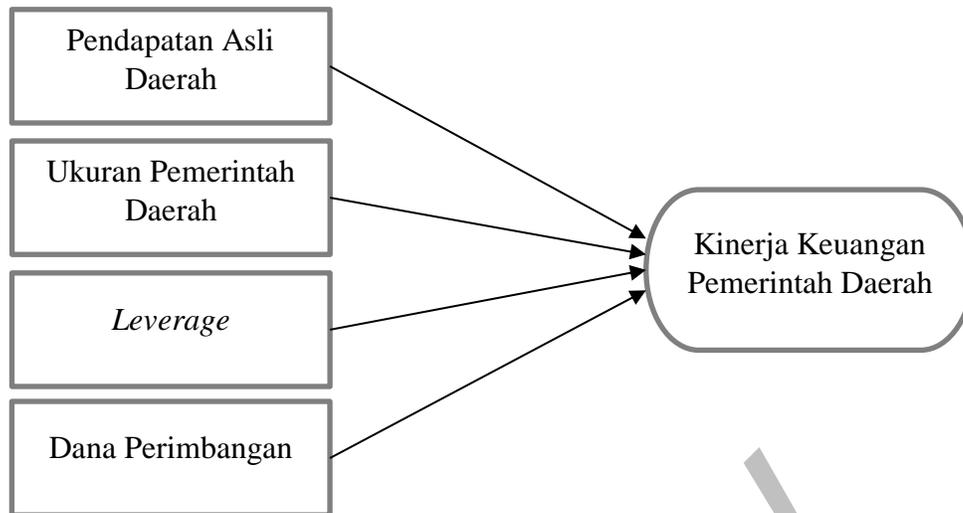
memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih kecil. Sari (2016) memilih untuk memakai total aset dalam mengukur ukuran pemerintah daerah dikarenakan jumlahnya yang lebih stabil. Makin besarnya ukuran pemerintah daerah maka makin bagus pula kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

c. Pengaruh Leverage terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Leverage adalah rasio utang yang pengukurannya dapat menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dimana hasilnya dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat seberapa besar aset pada daerah tersebut dibebani oleh hutang. Jika suatu pemerintah daerah memiliki *leverage* yang tinggi maka bisa dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut buruk. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat *leverage* pada suatu pemerintah daerah maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang juga semakin buruk (Sari I. P., 2016).

d. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat guna membantu membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dana perimbangan terbagi menjadi 3 bagian yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (UU No. 33 Tahun 2004). Namun, dengan adanya perolehan dana perimbangan yang semakin meningkat maka memperlihatkan tingginya pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai keperluan daerahnya dan menyebabkan semakin menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Alfarisi, 2015).



Gambar 1. 1 Gambar Kerangka Konseptual

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

- a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
- b. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
- c. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
- d. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dijabarkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- d. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.5 Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah
Dapat digunakan sebagai bahan koreksi dan penilaian juga menjadi masukan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang perlu diambil sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kedepannya.
- b. Bagi Universitas/Akademisi
Dapat berkontribusi dalam menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik dan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan universitas/akademisi.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu, wawasan serta pemahaman peneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah.

1.6 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya memberikan batasan diantaranya yaitu dalam penelitian ini variabel bebas yang dipakai adalah pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan sementara untuk variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan objek yang pakai pada penelitian adalah pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN

SELANJUTNYA

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019.
- b. Variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019.
- c. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019.
- d. Variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar dapat terus memperbaiki serta meningkatkan kinerja keuangannya. Pemerintah daerah harus lebih dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan dari penerimaan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan.
- b. Penelitian ini hanya melakukan observasi pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah hanya menggunakan rasio efisiensi.

5.3 Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian pada pemerintah daerah provinsi lain yang belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti selanjutnya juga sebaiknya meneliti variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat menggunakan rasio lainnya seperti rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya juga

disarankan untuk memproksikan ukuran pemerintah daerah dengan proksi lain selain total aset.

©UKDW

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, H. S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *E-Jurnal Universitas Negeri Padang*, 3 (1), hal. 1-23.
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, & PA, E. D. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, Vol. 5, No. 2 : 132-144.
- Antari, N. G., & Sedana, I. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7 (2), hal. 1080-1110.
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Halaman 584-598 Vol. 5, No. 4.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *EKSIS*, Vol. XI No. 1.
- Budianto, & Alexander, S. (2016). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 4 No. 4 Hal. 844-851 .
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, J. P., Daulay, M., & Torong, Z. B. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Size, Leverage, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *KITABAH*, Volume 2, No. 1 .
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 1(1)*.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA.
- Masdiantini, P., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1150-1182.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, Vol. XV No.1.
- Nugroho, T., & Prasetyo, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan pendidikan*, Vol. 7 No. 1 Hlmn. 27-34.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2010/71TAHUN2010PP.HTM>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/56TAHUN2018PP.pdf>
- Putri, N. N., & Darmayanti, N. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 5, 2834-2861.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM FEKON*, Vol.3 No.1 (Februari).
- Sari, N. D., & Mustanda, I. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 8, 4759-4787.
- Satria, D., & Sari, H. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemeintah Kota Lhokseumawe). *AT-TASYRI*, Vol. X. No. 1.
- Supriyadi, E. (2014). *SPSS+Amos Statistik Data Analysis*. Jakarta: IN MEDIA.
- Suranta, S., Bandi, Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No 2 Desember.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/33TAHUN2004UU.htm>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/32tahun2004uu.htm>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2014/23TAHUN2014UU.pdf>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2014/23TAHUN2014UU.pdf>

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/28TAHUN2009UU.HTM>

Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

©UKDWM